

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008> di akses tanggal 06 maret 2020
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5702> akses tanggal 06 Maret 2020
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009> di akses tanggal 07 maret 2020
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Cetakan keempatbelas, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT.RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016. Nomor 26/PMK.10/2016 Tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan No. 51/kmk.04/200 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia <http://forwarderforum.com/peraturan-menteri-keuangan-nomor-26pmk-0102016-tanggal-19-pebruari-2016> di akses tanggal 07 maret 2020
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto

SBI <http://sukabumikota.kemenag.go.id/file/dokumen/D001388.pdf> di akses tanggal 06 maret 2020

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang system pembayaran pajak secara elektronik. <https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-26pj2014> di akses tanggal 08 maret 2020

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-02pj2019> di akses tanggal 29 Maret 2020

Resmi,Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK/05/2017 tentang perubahan aras peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Simorangkir. (2015). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: cetakan kedua Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Supramono & Damayanti, Theresia Woro. (2015). *Perpajakan Indonesia-mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: CV ANDI.

Undang–Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 mengatur tentang pemungutan pajak.https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Perubahan_III di akses tanggal 06 maret 2020

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yolina.(2009). *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Tabora Media.